

PERAN PEMERINTAH, SEKTOR SWASTA, DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA GULAMO DI KABUPATEN KAMPAR

THE ROLE OF GOVERNMENT, PRIVATE SECTOR, AND COMMUNITY IN DEVELOPING GULAMO TOURISM OBJECT IN KAMPAR REGENCY

Hernimawati¹, Surya Dailati, Sudaryanto², Jeni Saputri³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning, Kota Pekanbaru, Indonesia

E-mail: sudaryantofia@unilak.ac.id

Abstrak: Pengembangan pariwisata daerah merupakan bagian dari kebijakan publik yang memerlukan keterlibatan berbagai aktor, khususnya pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Kabupaten Kampar memiliki potensi wisata alam yang besar, salah satunya adalah objek wisata Gulamo di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar. Namun, pengembangan objek wisata tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Gulamo serta mengidentifikasi hambatan dan strategi pengembangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling dari unsur pemerintah, pengelola wisata, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengembangan objek wisata Gulamo masih belum optimal, sementara masyarakat telah berperan aktif meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Hambatan utama pengembangan wisata meliputi keterbatasan infrastruktur, minimnya promosi, dan lemahnya koordinasi antaraktor. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola kolaboratif melalui peningkatan peran pemerintah daerah, keterlibatan sektor swasta yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata.

Kata Kunci: pengembangan pariwisata, tata kelola, kolaborasi aktor, objek wisata Gulamo.

Abstract: The development of regional tourism is an integral part of public policy that requires the involvement of multiple actors, particularly local government, the private sector, and the community. Kampar Regency has significant natural tourism potential, one of which is the Gulamo tourist attraction located in Tanjung Alai Village, XIII Koto Kampar District. However, the development of this tourist attraction has not been optimal. This study aims to analyze the roles of local government, the private sector, and the community in developing the Gulamo tourist attraction, as well as to identify the obstacles and development strategies. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling from government institutions, tourism managers, private sector representatives, and local communities. The findings indicate that the roles of local government and the private sector in the development of the Gulamo tourist attraction remain limited, while the community has played an active role despite resource constraints. The main obstacles include inadequate infrastructure, limited promotion, and weak coordination among stakeholders. This study recommends strengthening collaborative governance through enhanced government involvement, sustainable private sector participation, and community empowerment in tourism management.

Keywords: tourism development, governance, stakeholder collaboration, Gulamo tourist attraction.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja. Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh kejelasan peran aktor, koordinasi kelembagaan, serta kapasitas sumber daya yang terlibat (Pasolong, 2014). pengembangan pariwisata dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara sistematis. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan arah kebijakan pengembangan pariwisata melalui penyediaan regulasi, infrastruktur, serta dukungan kelembagaan. Keberadaan kebijakan yang jelas dan konsisten menjadi prasyarat penting agar potensi pariwisata daerah dapat dikembangkan secara optimal. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, potensi wisata yang dimiliki suatu daerah cenderung tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.

Selain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat merupakan aktor penting dalam pengembangan pariwisata. Sektor swasta berperan dalam penyediaan investasi dan pengembangan industri pariwisata, sementara masyarakat lokal berperan sebagai pengelola, tenaga kerja, dan tuan rumah bagi wisatawan. Hal ini sejalan dengan pandangan pembangunan berbasis masyarakat yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan (Theresia et al., 2014). Sinergi antaraktor tersebut menjadi faktor penentu dalam menciptakan destinasi

wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, pengembangan pariwisata daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antaraktor, serta rendahnya kapasitas pengelolaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengembangan pariwisata tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek tata kelola pemerintahan dan implementasi kebijakan publik.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup beragam. Keberadaan sungai, danau, perbukitan, serta kearifan lokal masyarakat menjadi modal penting dalam pengembangan sektor pariwisata daerah. Potensi tersebut apabila dikelola secara optimal dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu objek wisata alam yang memiliki potensi besar di Kabupaten Kampar adalah Objek Wisata Gulamo yang terletak di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar. Lokasi objek wisata ini berada di jalur perlintasan strategis antara Provinsi Riau dan Sumatera Barat, sehingga memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Daya tarik utama objek wisata Gulamo terletak pada keindahan panorama danau PLTA, wisata air, dan air terjun alami.

Objek pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang perlu digali baik di daerah maupun di pusat. Negara maju sudah jauh-jauh hari berpikir dan berbuat untuk menjadi negara tujuan wisata, sebagaimana contohnya Negara Singapura. Negara yang berbatasan dengan Indonesia dan dekat dengan Provinsi Riau ini sebenarnya kurang memiliki potensi wisata alam, namun melakukan pengembangan



dan mengelola potensi yang ada menjadi lebih menarik.

Kabupaten Kampar sebagai salah satu kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Riau memiliki beragam objek wisata yang menarik. Baik itu wisata budaya maupun alam. Diantaranya adalah objek wisata Gulamo yang terletak di perbatasan; dekat dengan Provinsi Sumatera Barat. Objek wisata ini sudah lama ada di Kabupaten Kampar, namun belum banyak orang yang tahu dan berkunjung untuk menikmati keindahan alamnya.

Tabel 1. Objek Wisata di Kecamatan III Kota Kampar

No	Nama	Keterangan
1	Candi Muara Takus	Wisata Budaya dan Agama
2	Hendferd Land Binamang	Wisata Alam dan Buatan
3	Air Terjun Pulau Simo	Wisata Alam
4	Puncak Kompe	Wisata Alam
5	Gulamo	Wisata Air
6	Kampung Patin	Desa Wisata
7	Danau Rusa	Wisata Danau
8	Tepian Mahligai	Wisata Buatan

Sumber: Lapangan, 2025.

Objek wisata Gulamo berada di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Bagi masyarakat yang melewati jalan lintas nasional (Riau – Sumatera Barat), dapat selalu singgah untuk menikmati keindahan alam do objek wisata tersebut sambil menikmati masakan khas daerah yakni ikan baung, selais, tappa dan lainnya.

Datang ke objek wisata Gulamo, tidak hanya menyajikan keindahan alam yang indah untuk dipandang namun juga akan menguji kekuatan stamina. Di objek wisata Gulamo juga terdapat air terjun dan areal berenang yang menakjubkan. Sudah

banyak pengunjung yang datang, baik secara lokal, dosmetik, nasional maupun internasional.

Besarnya potensi yang dimiliki harus dikembangkan agar menjadi tujuan wisatawan dalam dan luar negeri untuk dikunjungi. Oleh karena itu perlu keterlibatan semua pihak dalam pengembangannya. Apalagi dengan tersedia fasilitas Jalan Tol Trans Sumatera, merupakan potensi yang sangat besar untuk menarik minat pengunjung/ turis datang dan berkunjung. Sebelum sampai ke lokasi tujuan (objek wisata Gulamo), wisatawan akan disuguhkan keindahan alam Dana PLTA XIII Kota Panjang, Gugusan Bukit Barisan dan lainnya.

Gambar 1. Turis di objek wisata Gulamo



Sumber: Pengelola Objek Wisata Gulamo, 2024

Objek wisata Gulamo dikelola oleh masyarakat lokal dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada. Butuh waktu 2 jam perjalanan untuk sampai ke lokasi sambil menikmati panorama danau dengan masakan khas daerah (Kampar) yang tersedia dan harga relatif terjangkau. Wisatawan yang datang selama ini bahkan ada yang bermalam (camping) baik komunitas swasta maupun pemerintah.

Meskipun memiliki potensi alam dan lokasi yang strategis, pengembangan objek wisata Gulamo belum menunjukkan hasil yang optimal. Pengelolaan objek wisata masih dilakukan secara sederhana dan belum didukung oleh perencanaan yang terintegrasi. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi wisata yang dimiliki dengan

tingkat pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan objek wisata Gulamo meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, minimnya kegiatan promosi, serta akses informasi dan komunikasi yang belum memadai. Selain itu, dukungan pemerintah daerah dan keterlibatan sektor swasta masih relatif terbatas, sehingga pengembangan wisata belum berjalan secara berkelanjutan.

Menurut Bambang (2013), pengembangan destinasi pariwisata dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sektor swasta sebagai investor dan penggerak industri pariwisata, serta masyarakat sebagai pengelola dan penerima manfaat. Sinergi ketiga aktor tersebut menjadi kunci keberhasilan pengembangan pariwisata daerah.

Dalam perspektif administrasi publik, pengembangan pariwisata juga berkaitan dengan implementasi kebijakan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas menjadi landasan penting dalam memastikan kebijakan pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan secara optimal. Tanpa penerapan prinsip tersebut, kebijakan pariwisata berpotensi mengalami hambatan dalam implementasi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antaraktor dan keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan sektor pariwisata daerah. Penelitian Angriani (2021) dalam Jurnal JIANA menemukan bahwa ketidaksesuaian kebijakan dan strategi yang kurang tepat dapat menghambat pengembangan kelembagaan ekonomi lokal. Evaluasi terhadap pengembangan objek wisata dilakukan untuk menilai efektivitas peran aktor dan pencapaian tujuan kebijakan

pembangunan pariwisata daerah (Akbar & Mohi, 2018). Temuan tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi peran aktor dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis pengembangan objek wisata alam berbasis kolaborasi aktor di wilayah perlintasan strategis masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek potensi dan dampak ekonomi pariwisata, tanpa mengkaji secara mendalam dinamika peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam tata kelola pariwisata daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Gulamo dengan pendekatan tata kelola kolaboratif. Penelitian ini menekankan pada identifikasi bentuk keterlibatan aktor, hambatan pengembangan, serta strategi pengembangan wisata yang sesuai dengan kondisi lokal.

Objek wisata Gulamo dipilih sebagai studi kasus karena memiliki potensi besar namun belum dikelola secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai tantangan pengembangan pariwisata daerah, khususnya dalam konteks koordinasi antaraktor dan implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan objek wisata Gulamo. Kondisi tersebut tercermin dari keterbatasan infrastruktur, minimnya promosi, serta lemahnya sinergi antaraktor dalam pengelolaan destinasi wisata.

Kajian mengenai pengembangan pariwisata daerah dalam perspektif administrasi publik semakin berkembang, khususnya yang menekankan pentingnya

keterlibatan berbagai aktor dalam proses kebijakan dan tata kelola destinasi. Dalam literatur administrasi publik, pendekatan collaborative governance dipahami sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam forum kolaboratif yang terstruktur dan berorientasi pada konsensus (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini menekankan bahwa kompleksitas permasalahan publik, termasuk pengembangan pariwisata, tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menjelaskan bahwa collaborative governance merupakan suatu sistem integratif yang dibangun melalui dinamika bersama antara prinsip bersama, kapasitas kolaboratif, dan tindakan kolaboratif. Model ini menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai pengendali utama, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan aktor non-negara. Dalam konteks kebijakan publik, keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan peran aktor, komitmen bersama, serta mekanisme koordinasi yang efektif. Perspektif ini relevan untuk menganalisis pengembangan pariwisata daerah yang melibatkan berbagai kepentingan dan sumber daya.

Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor dalam sektor pariwisata berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola destinasi dan keberlanjutan pembangunan. Penelitian dalam Journal of Sustainable Tourism menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat lokal dan sektor swasta, dengan dukungan kebijakan pemerintah, dapat meningkatkan daya saing destinasi serta pemerataan manfaat ekonomi pariwisata. Namun demikian, banyak penelitian tersebut masih menempatkan kolaborasi sebatas pada aspek partisipasi atau kemitraan ekonomi,

tanpa mengkaji secara mendalam dinamika peran dan hambatan koordinasi antaraktor dalam implementasi kebijakan pariwisata.

Dalam kajian administrasi publik, Journal of Public Administration Research and Theory (JPART) menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menghadapi tantangan serius, seperti ketimpangan kekuasaan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan lemahnya kepercayaan antaraktor. Ansell dan Gash (2008) menyebutkan bahwa tanpa kepemimpinan fasilitatif dan kerangka institusional yang jelas, kolaborasi berpotensi menjadi simbolik dan tidak menghasilkan dampak kebijakan yang nyata. Oleh karena itu, analisis empiris yang mengkaji bagaimana kolaborasi dijalankan di tingkat lokal menjadi penting untuk memperkaya pemahaman teoretis dan praktis tentang tata kelola kolaboratif.

Penelitian terdahulu di Indonesia umumnya menyoroti pengembangan pariwisata dari sisi potensi alam, dampak ekonomi, atau peran tunggal aktor tertentu, seperti pemerintah daerah atau masyarakat lokal. Kajian yang secara simultan menganalisis peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam satu kerangka collaborative governance masih relatif terbatas, khususnya pada objek wisata alam yang berada di wilayah perlintasan strategis. Padahal, wilayah semacam ini memiliki karakteristik kebijakan dan tata kelola yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh arus mobilitas, kepentingan ekonomi, dan keterbatasan infrastruktur.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada pengungkapan ketimpangan peran antaraktor dalam pengembangan objek wisata Gulamo, di mana masyarakat lokal justru menjadi aktor paling aktif, sementara peran pemerintah daerah dan sektor swasta belum berjalan optimal. Temuan ini memperkuat argumen Emerson et al. (2012) bahwa kapasitas kolaboratif tidak selalu

seimbang antaraktor dan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal serta dukungan kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peran aktor, tetapi juga mengkritisi efektivitas kolaborasi dalam implementasi kebijakan pariwisata daerah.

Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan perspektif administrasi publik untuk membaca pengembangan pariwisata sebagai bagian dari implementasi kebijakan publik, bukan sekadar aktivitas ekonomi atau rekreasi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara kebijakan, aktor, dan praktik pengelolaan di lapangan. Dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori collaborative governance, penelitian ini menjembatani kesenjangan antara teori kebijakan publik dan praktik pengelolaan pariwisata di tingkat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya dalam kajian tata kelola pariwisata daerah berbasis kolaborasi aktor. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus collaborative governance melalui bukti empiris dari konteks lokal Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata yang lebih inklusif, terkoordinasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat secara proporsional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Gulamo di Kabupaten Kampar; (2) faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pengembangan objek wisata tersebut; dan (3) bagaimana strategi pengembangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola objek wisata Gulamo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktor terkait, mengidentifikasi hambatan pengembangan, serta merumuskan strategi pengembangan objek wisata Gulamo yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Gulamo di Kabupaten Kampar. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali realitas sosial, persepsi, serta pengalaman para aktor yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata.

Penelitian dilaksanakan di Objek Wisata Gulamo, Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa objek wisata Gulamo memiliki potensi wisata alam yang besar, namun masih menghadapi berbagai permasalahan terkait infrastruktur, promosi, dan tata kelola pengelolaan wisata. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu tahun 2024–2025, pada saat aktivitas pengelolaan dan kunjungan wisata berlangsung secara aktif.

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengembangan objek wisata Gulamo. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah daerah, pengelola objek wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), sektor swasta, serta masyarakat lokal di sekitar kawasan wisata. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mewakili berbagai perspektif aktor yang terlibat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data



sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian dan wawancara semi-terstruktur dengan para informan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, seperti laporan pengelolaan objek wisata, data pendukung, foto kegiatan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan pengembangan pariwisata dan administrasi publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi fisik objek wisata, ketersediaan sarana dan prasarana, serta aktivitas pengelolaan dan kunjungan wisatawan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai peran masing-masing aktor, hambatan yang dihadapi, serta upaya dan strategi pengembangan objek wisata. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama sesuai dengan fokus penelitian, yaitu peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, serta hambatan dan strategi pengembangan objek wisata Gulamo. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan data pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Gulamo

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan objek wisata Gulamo, terutama dalam penyediaan kebijakan, fasilitas, dan infrastruktur pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Gulamo masih belum optimal. Hal ini tercermin dari

keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas sanitasi, akses transportasi, serta infrastruktur dasar lainnya yang belum memadai. Secara umum, kondisi fisik dan daya tarik alam objek wisata Gulamo dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Objek Wisata Gulamo



Sumber: Lapangan, 2024.

Keterlibatan pemerintah daerah selama ini lebih bersifat insidental dan belum didukung oleh perencanaan pengembangan wisata yang terstruktur. Kegiatan promosi yang dilakukan juga masih terbatas dan belum berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dalam pengembangan pariwisata belum dijalankan secara maksimal.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Bambang (2013) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan kebijakan dan infrastruktur. Tanpa dukungan tersebut, pengembangan destinasi wisata cenderung berjalan secara parsial dan tidak berkelanjutan.

2. Peran Sektor Swasta dalam Pengembangan Objek Wisata Gulamo

Sektor swasta memiliki peran penting dalam pengembangan objek wisata melalui penyediaan investasi dan fasilitas pendukung pariwisata. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan objek wisata Gulamo masih relatif terbatas. Keterlibatan swasta yang pernah ada belum berkelanjutan dan belum mampu mendorong pengembangan wisata secara signifikan.

Gambar 3. Pembangunan kamar mandi yang difasilitasi Bank Indonesia



Sumber: Lapangan, 2024.

Minimnya keterlibatan sektor swasta menunjukkan belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam pengembangan objek wisata Gulamo. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dasar serta belum adanya skema kerja sama yang jelas antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Kondisi ini berdampak pada lambatnya pengembangan fasilitas dan layanan wisata.

Dalam perspektif administrasi publik, keterlibatan sektor swasta merupakan bagian dari tata kelola kolaboratif yang diperlukan dalam pengembangan pariwisata daerah. Tanpa adanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, pengembangan wisata akan sulit mencapai keberlanjutan dan daya saing.

3. Peran Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Gulamo

Masyarakat lokal memiliki peran penting sebagai pengelola dan pelaku utama dalam pengembangan objek wisata Gulamo. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga mengelola fasilitas pendukung wisata. Keterlibatan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sebagai sumber manfaat ekonomi dan sosial bagi desa.

Peran masyarakat juga tercermin dalam aktivitas pelayanan kepada wisatawan, seperti pengaturan area kunjungan, penyediaan jasa informal, serta pemberian informasi kepada pengunjung. Kegiatan tersebut dilakukan secara swadaya dan berbasis inisiatif lokal, meskipun belum didukung oleh sistem pengelolaan yang terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menjadi aktor penting dalam menjaga keberlangsungan operasional objek wisata Gulamo.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Gulamo menjadi modal sosial yang bernilai strategis. Kepercayaan, kerja sama, dan rasa memiliki terhadap objek wisata mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan destinasi. Modal sosial ini berperan penting dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan wisata berbasis lokal, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Namun demikian, keterlibatan masyarakat masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan minimnya pendampingan dari pihak terkait. Sebagian besar pengelola wisata belum memiliki keterampilan manajerial, pemasaran, dan pelayanan wisata yang memadai. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya pengelolaan objek wisata dan rendahnya daya saing destinasi.

Selain keterbatasan kapasitas, dukungan kelembagaan terhadap masyarakat pengelola wisata juga masih relatif lemah. Belum adanya struktur organisasi yang kuat dan pembagian peran

yang jelas menyebabkan pengelolaan wisata berjalan secara informal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan masyarakat agar pengelolaan objek wisata dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep pembangunan berbasis masyarakat yang menekankan pentingnya pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek, sehingga peran dan kapasitas mereka menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan destinasi wisata.

Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat dalam pengembangan objek wisata Gulamo perlu didukung oleh kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan keberlanjutan. Program pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi kelembagaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan wisata. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi pengelola wisata yang mandiri dan berdaya saing dalam pengembangan objek wisata Gulamo di Kabupaten Kampar.

4. Hambatan dan Strategi Pengembangan Objek Wisata Gulamo

Hambatan utama dalam pengembangan objek wisata Gulamo terletak pada keterbatasan infrastruktur pendukung yang belum memadai. Sarana dan prasarana seperti fasilitas sanitasi, dermaga, akses transportasi, serta jaringan komunikasi masih terbatas, sehingga berdampak pada kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan fisik destinasi wisata belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Keterbatasan infrastruktur, minimnya kegiatan promosi juga menjadi hambatan dalam pengembangan objek

wisata Gulamo. Promosi yang dilakukan masih bersifat sporadis dan belum memanfaatkan media digital secara optimal. Akibatnya, informasi mengenai keberadaan dan potensi objek wisata Gulamo belum tersampaikan secara luas kepada calon wisatawan, baik di tingkat regional maupun nasional.

Hambatan lainnya adalah lemahnya koordinasi dan sinergi antaraktor yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Gulamo. Peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat belum terintegrasi dalam suatu kerangka kerja sama yang jelas. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan wisata berjalan secara parsial dan belum mampu menciptakan tata kelola destinasi yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hambatan tersebut, diperlukan strategi pengembangan yang menekankan pada penguatan peran pemerintah daerah sebagai pengarah dan fasilitator pengembangan pariwisata. Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan pengembangan objek wisata yang terintegrasi, menyediakan infrastruktur dasar yang memadai, serta menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan destinasi wisata secara berkelanjutan.

Strategi pengembangan juga perlu mendorong keterlibatan sektor swasta melalui skema kerja sama yang jelas dan saling menguntungkan. Keterlibatan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat penyediaan fasilitas pendukung, meningkatkan kualitas layanan wisata, serta memperluas kegiatan promosi. Skema kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi langkah strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor pariwisata.

Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat lokal merupakan strategi penting dalam pengembangan objek wisata Gulamo. Masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan wisata melalui peningkatan keterampilan, pendampingan, dan pemberdayaan kelembagaan. Pendekatan kolaboratif yang



melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tata kelola serta keberlanjutan pengembangan objek wisata Gulamo di Kabupaten Kampar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan objek wisata Gulamo di Kabupaten Kampar telah melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, namun keterlibatan ketiga aktor tersebut belum berjalan secara optimal dan terintegrasi. Pengelolaan wisata masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada aspek infrastruktur, promosi, serta tata kelola kelembagaan, sehingga potensi wisata yang dimiliki belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah.

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Gulamo masih cenderung terbatas dan belum didukung oleh perencanaan pengembangan pariwisata yang sistematis dan berkelanjutan. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas sanitasi, akses transportasi, serta infrastruktur dasar lainnya, menunjukkan bahwa fungsi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pembangunan pariwisata belum dijalankan secara maksimal.

Sektor swasta memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan pariwisata melalui penyediaan investasi dan fasilitas pendukung. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan objek wisata Gulamo masih relatif minim dan bersifat tidak berkelanjutan. Kondisi ini mencerminkan belum terciptanya iklim investasi dan skema kemitraan yang kondusif antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pengembangan destinasi wisata.

Masyarakat lokal telah berperan aktif dalam menjaga dan mengelola objek wisata Gulamo, meskipun dengan keterbatasan sumber daya dan dukungan kelembagaan. Partisipasi masyarakat menjadi modal sosial yang penting dalam pengembangan wisata berbasis lokal. Namun, keterbatasan kapasitas pengelolaan dan minimnya pendampingan menyebabkan peran masyarakat belum mampu mendorong pengembangan wisata secara profesional dan berkelanjutan.

Hambatan utama dalam pengembangan objek wisata Gulamo meliputi keterbatasan infrastruktur pendukung, rendahnya intensitas promosi, serta lemahnya koordinasi dan sinergi antaraktor yang terlibat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata belum dikelola secara terpadu dan memerlukan pendekatan kolaboratif yang lebih kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan komitmen dalam pengembangan objek wisata Gulamo melalui penyusunan perencanaan pengembangan wisata yang terintegrasi, penyediaan infrastruktur dasar, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, perlu didorong keterlibatan sektor swasta melalui skema kerja sama yang jelas dan berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tata kelola dan keberlanjutan pengembangan objek wisata Gulamo di Kabupaten Kampar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, penelitian mengenai



pengembangan objek wisata Gulamo di Kabupaten Kampar ini tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan dan sivitas akademika Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan akademik, fasilitas, serta iklim ilmiah yang kondusif bagi pelaksanaan penelitian ini. Dukungan institusional tersebut sangat membantu penulis dalam menjalankan proses penelitian secara sistematis dan bertanggung jawab.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya instansi terkait serta Pemerintah Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, yang telah memberikan izin, akses data, dan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Kerja sama yang baik dari pihak pemerintah daerah sangat mendukung kelancaran pengumpulan data di lapangan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pengelola objek wisata Gulamo, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta para pelaku usaha dan sektor swasta yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pandangan terkait pengembangan objek wisata Gulamo. Kontribusi informan menjadi sumber data utama yang memperkaya hasil penelitian ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Tanjung Alai yang telah menerima penulis dengan baik selama pelaksanaan penelitian lapangan. Partisipasi, keterbukaan, serta dukungan masyarakat lokal sangat membantu penulis dalam memahami kondisi empiris pengelolaan dan pengembangan objek wisata Gulamo secara lebih komprehensif.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral, masukan, serta diskusi akademik selama proses penyusunan penelitian ini. Saran dan

masukan yang diberikan sangat bermanfaat dalam penyempurnaan karya ilmiah ini.

Akhir kata, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya dalam kajian tata kelola pariwisata daerah, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan objek wisata Gulamo di Kabupaten Kampar secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., & Mohi, W. (2018). *Studi evaluasi kebijakan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Angriani, V. (2021). Evaluasi strategi pengembangan terhadap koperasi syariah di Kota Pekanbaru. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(2), 145–158.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Hall, C. M. (2011). Policy learning and policy failure in sustainable tourism governance: From first- and second-order to third-order change? *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 649–671. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.555555>

- Jamal, T., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. *Annals of Tourism Research*, 22(1), 186–204.
[https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00067-3](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00067-3)
- Knollenberg, W., McGehee, N. G., Boley, B. B., & Clemons, D. (2021). Developing community capacity for tourism through collaborative governance. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(2–3), 360–378.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1760127>
- Pasolong, H. (2014). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.
- Theresia, A., Andini, K. R., Nugraha, P. G., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Voets, J., Brandsen, T., & Koliba, C. (2015). Collaborative governance. In J. Torfing, B. G. Peters, J. Pierre, & E. Sørensen (Eds.), *Interactive governance: Advancing the paradigm* (pp. 123–137). Oxford: Oxford University Press.
- Yusuf, M. (2014). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.